

**PENGARUH *CIVIC LITERACY* DALAM PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PARTISIPASI
POLITIK SISWA
(Studi Deskriptif Analitis Terhadap Siswa SMA Kota Bandung)**

(Diterima 08 Maret 2016; direvisi 10 Maret 2016; disetujui 20 Maret 2016)

Ikman Nur Rahman¹

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa, Serang
e-mail : ta.pancasila@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik yang aktif dari semua anggota masyarakat merupakan ciri dari keberhasilan cita-cita demokrasi. Dengan demikian diperlukan warga negara yang ideal demokratis yang seyogyanya tampil sebagai “Informed and Reasoned Decission Maker atau pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kemelekwacanaan warga negara (*civic literacy*) diartikan sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga untuk memahami dunia politik mereka, dengan pengetahuan yang menjadi dasar partisipasi politiknya diharapkan mampu menambah efikasinya. Sedangkan keterampilan partisipatori kemampuan seseorang berpartisipasi dalam berbagai pembuatan kebijakan publik. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diharapkan warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan penuh tanggung jawab, serta terampil dalam melakukan tindakan yang terarah dan efektif.

Kata Kunci : *Civic Literacy*, Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Para pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah mereka yang berumur 17 s.d 21 tahun merupakan pemilih pemula yang baru akan pertama kali mengikuti Pemilu. Jumlah dari pemilih pemula ini sangat banyak sehingga partai-partai politik seringkali memburu pemilih pemula sebagai sasaran utama kampanye politik.

Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah penduduk muda (usia di bawah 40 tahun) sekitar 95,7 juta jiwa, jumlah tersebut setara dengan 61,5 % dari penduduk usia pemilih Sementara, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih pemula di Indonesia mencapai 30% dari 174 juta total pemilih Tahun 2009. Hasil penelitian Litbang Kompas menyebutkan bahwa antusiasme pemilih pemula, yaitu pemilih yang mengikuti Pemilu 2009 untuk pertama kalinya, terangkum dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 25-27 November lalu. Dari sejumlah pemilih pemula yang diwawancarai melalui telepon, terungkap bahwa

mayoritas (86,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu. Tingkat antusiasme ini termasuk paling tinggi. Pada kelompok pemilih muda lainnya, yang sudah pernah menggunakan hak suaranya, seperti kelompok usia 22-29 tahun dan 30-40 tahun, tingkat antusiasmenya lebih rendah sekitar 5 %. Pada kelompok usia yang lebih tua, yakni 41 tahun ke atas, antusiasme untuk mengikuti pemilu dalam bentuk memberikan suara lebih rendah lagi, yaitu 79,3 persen.

Besarnya potensi pemilih pemula ini haruslah mendapat perhatian khusus sehingga mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh partai politik, salah satu pemanfaatan pemilih pemula adalah pada saat kampanye mereka kerap hanya dimobilisasi oleh parpol untuk mengikuti kampanye. Selain itu partai politik yang tujuannya hanya untuk menarik suara sebanyak-banyak seringkali lupa untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula sehingga mereka sering melupakan untuk mengingatkan kepada pemilih pemula untuk benar-benar peduli dengan Pemilu. Selain rentan

dimanfaatkan oleh partai politik, pemilih pemula juga rentan akan menjadi golput, karena kepedulian mereka terhadap Pemilu masih sangat kecil.

Pemahaman mengenai pemilihan Kepekaan seseorang terhadap politik pun berkembang sejalan dengan berlansungnya proses sosialisasi dan kepekaan politik itu dapat dipelajari dan dibelajarkan. Sekolah sebagai saana sosialisasi politik merupakan tempat yang banyak memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kepekaan politik anak. Semakin ekstensif pendidikan seseorang, semakin banyak dia menyadari pengaruh pemerintah, untuk mengikuti politik, untuk mendapatkan informasi politik, untuk memiliki cakrawala lebih lebar mengenai opini-opini dan masalah-masalah politik, terlibat dalam diskusi-diskusi politik dengan sekumpulan orang yang lebih banyak, merasa mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi permasalahan-permasalahan politik, untuk menjadi anggota suatu organisasi dan aktif dalam suatu organisasi secara sukarela, dan memperlihatkan/

menaruh kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya, dan memperlihatkan perasaan-perasaan kepercayaan dan pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berpartisipasi lebih aktif. (Mas'ood dan MacAndrews dalam Sapriya & Winataputra : 2003, Almond dan Verba dalam Rush dan Althoff 2005 : 67-68)

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kompetensi tersebut, kemelekwacanaan warga negara (*civic literacy*) penting bagi peningkatan kualitas partisipasi politik karena keterlibatan rakyat dalam proses politik harus didasari pengetahuan yang memadai. Partisipasi warga negara yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya. *"The expression "civic literacy" encapsulates the closely linked concepts of "civic engagement" (a*

key component of social capital for Putnam) and "literacy" or political knowledge. ... possible ways of enhancing civic literacy in Canada under three headings: education, media use and political institutions". (Suryadi, 2009 : 207, Milner 2001 : 7-8).

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa *civic literacy* berhubungan dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*). Kemelekwacanaan warga negara disini diartikan sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka. Kemelekwacanaan warga negara juga merupakan ciri dari masyarakat madani dan keseluruhan indikator yang memungkinkan untuk membandingkan masyarakat sesuai dengan proporsi kewarganegaraannya masing-masing, yakni memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk pilihan politik yang efektif. Dimana pengetahuan politik tersebut bisa didapat dari dunia pendidikan, media baik elektronik maupun cetak dan institusi politik yang diantaranya adalah partai politik. Tiga poin penting ini yang berperan sangat

penting memberikan pengaruh terhadap kualitas partisipasi politik siswa. Sehingga para pemilih diharapkan dapat lebih bijak untuk memilih (*civic virtue*) partai mana yang akan di pilihnya dalam Pemilu. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, siswa sebagai bagian dari warga negara atau warga masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat akan banyak dihadapkan pada masalah-masalah politik. Untuk menghadapi masalah-masalah politik itu, siswa perlu memahami politik agar tumbuh kesadaran politik dan pada akhirnya akan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori siswa sehingga siswa diharapkan menjadi warga negara yang partisipatif.

TINAUAN MENGENAI CIVIC LITERACY

Kepedulian warga negara terhadap Pemilu masih sangat kecil, kemelekwacanaan warga negara

(*civic literacy*) penting bagi peningkatan kualitas partisipasi politik karena keterlibatan rakyat dalam proses politik harus didasari pengetahuan yang memadai. Partisipasi warga negara yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya (Suryadi, 2009 : 207). Sehubungan dengan itu Milner (2001 : 7-8) mengatakan bahwa "*The expression "civic literacy" encapsulates the closely linked concepts of "civic engagement" (a key component of social capital for Putnam) and "literacy" or political knowledge. ... possible ways of enhancing civic literacy in Canada under three headings: education, media use and political institutions*".

Kemelekwacanaan warga negara merupakan pengetahuan dasar yang dimiliki setiap warga negara mengenai proses politik, sehingga tidak akan ada orang yang memiliki pengetahuan yang sama. Perbedaan inilah yang akan memicu perbedaan partisipasi mereka dalam kehidupan politiknya. Seperti kritik-kritik masyarakat mengenai proses pemerintahan melalui media massa, media sosial atau media publik

lainnya, dimana setiap kegiatan masyarakat dalam proses politiknya itu dapat mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat tersebut dapat membawa masyarakat menuju kesejahteraan.

Kemelekwacanaan warga negara ini bisa ditingkatkan melalui tiga aspek yakni pendidikan, penggunaan media massa dan institusi politik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling menunjang untuk mendorong peningkatan civic literacy sebagaimana yang dijelaskan Milner (2001 : 22) bahwa "... the most likely method of improving levels of civic literacy is civics education" Untuk mengukur tingkat civic literacy ada dua indikator yakni factual knowledge dan cognitive proficiency (Milner, 2003:55). Factual knowledge (pengetahuan faktual) merujuk pada pengetahuan mengenai sistem politik dan pemerintahan negara masing-masing, sehingga tidak ada instrumen baku untuk mengukur tingkat pengetahuan faktual ini. Namun, ada hal yang biasa di tanyakan di setiap negara antara lain mengenai posisi politik

yang paling penting di negara mereka (perdana menteri, keuangan, menteri dll), dan meminta responden nama dan afiliasi politik dari orang yang menduduki posisi tersebut. Serangkaian pertanyaan lain dapat menguji pengetahuan tentang posisi partai besar pada isu-isu kunci dan praktek konstitusional dan institusional dasar seperti selang waktu antara pemilihan umum, komposisi komite legislatif, atau kekuasaan tertentu dari pemerintah daerah. *Cognitive Proficiency* (kecakapan kognitif) di dapat dari materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Dalam mengukur tingkat penguasaan kecakapan kognitif ini digunakan indikator sebagai berikut : (a) Dapat menjelaskan pentingnya ideologi politik dan perkembangannya, dan bagaimana ideologi mempengaruhi pandangan dalam berbagai kondisi sosial, (b) Mengetahui pengetahuan yang luas tentang bagaimana kondisi negara saat ini dan mampu membuat perbandingan dengan kondisi negara-negara lain, (c) Tahu apa pengaruh kondisi ekonomi komunitas, perusahaan dan individu, (d) Dapat menempatkan ekonomi, pem

angunan politik dan sosial dalam perspektif sejarah, (e) Dapat Mempertimbangkan hubungan internasional dan kondisi global dari ekonomi, politik, aspek hukum dan budaya serta menjadi sadar kondisi untuk melakukan kerja sama internasional untuk tujuan politik dan sarana kebijakan keamanan, (f) dapat menggunakan berbagai sumber pengetahuan dan alat untuk menganalisis dan mendiskusikan isu-isu sosial, menggunakan pendekatan yang berbeda, dan dalam seperti cara memperkuat pendapat sendiri.

TINJAUAN MENENGGAI PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam kegiatan proses pengambilan keputusan politik. Dalam suatu negara atau masyarakat yang demokratis, partisipasi warga negara dalam proses politik merupakan syarat utama. Sedikitnya ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik ialah proses modernisasi, perubahan-perubahan struktur kelas sosial, pengaruh kaum intelektual dan

komunikasi massa modern, konflik diantar kelompok-kelompok pemimpin politik, dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial (Sapriya dan Winataputra, 2004 : 195).

Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff (1971 : 23) mendefinikan partisipasi politik sebagai ketrlibatan individu pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Sastroadmodjo 1995 : 8) partisipasi politik ternyata dibedakan sekurangnya dalam empat kategori: Pertama, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua spektator artinya orang yang setidak-tidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga gladiator artinya

mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Keempat pengritik artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional

Michael Rush dan Phillip Althoff (2005: 122), mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut :

- Menduduki jabatan politik atau administratif,
- Mencari jabatan politik / administratif,
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
- Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik (quasi-political),
- Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,
- Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (voting)

Tingkat pengetahuan dan kemampuan berpartisipasi warga sangat berpengaruh pada pembuatan kebijakan yang optimal. Dimana proses perumusan kebijakan yang efektif memperhatikan keselarasan antara usulan kebijakan dengan agenda dan strategi besar (grand design) pemerintah. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik sering diartikan sebagai ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Seperti kata Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2006:6), seringkali, kebijakan publik tidak lebih dari pengertian mengenai ‘*whatever government choose to do or not to do.*’ Dalam konteks kebijakan publik, modal sosial pada intinya menunjuk pada *political will* dan penciptaan jaringan-jaringan, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma, dan kebersamaan yang timbul dari

adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat.

Pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan, gotong-royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi sosial dalam sebuah komunitas. Modal sosial pada umumnya akan tumbuh dan berkembang bukan saja karena adanya kesamaan tujuan dan kepentingan, melainkan pula karena adanya kebebasan menyatakan pendapat dan berorganisasi, terjalinnya relasi yang berkelanjutan, serta terpeliharanya komunikasi dan dialog yang efektif. Gambar 2.4 menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi lingkaran modal sosial yang pada gilirannya menjadi pendorong keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode ini dilakukan dengan dokumentasi, survey dan

penyebaran angket. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Metode deskriptif-analitis dalam penelitian dioperasionalkan dengan menggunakan statistik inferensial yaitu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey, dimana peneliti mendeskriptifkan secara kuantitatif (angka-angka), kecenderungan-kecenderungan, perilaku-perilaku atau opini-opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur data pokok. Dari sampel ini peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim-klaim tentang populasi itu. Penelitian survey biasanya tidak membatasi dengan satu atau beberapa variabel. Para peneliti umumnya dapat menggunakan variabel serta populasi yang luas sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

HASIL PENELITIAN

Kemelekwacaan Warga (*civic literacy*) dalam pembelajaran PKN berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik sebesar 0.400. pengaruh yang cukup kuat ini menggambarkan bahwa PKN sebagai wahana pengembangan kemelekwacaan warga dapat dikatakan cukup berhasil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab (2008:120) bahwa pendidikan hendaknya dan harus mengembangkan potensi anak didik sepenuhnya dan mempersiapkan mereka untuk dunianya dimana mereka berada. Sehingga sekolah-sekolah harus meletakkan dasar-dasar yang positif, partisipatif dengan dua cara yang penting yakni membantu siswa memperoleh dan memahami informasi penting dan memberikan kesempatan dan dorongan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah.

Kemelekwacaan berkaitan erat dengan pengetahuan kewarga negaraan yakni informasi dasar yang harus diketahui oleh warga negara, seperti pengetahuan tentang sistem politik, pemerintahan, undang-undang, hak dan kewajiban dan

sebagainya. Kemudian merujuk pada tujuan PKN agar peserta didik memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi dapat dikatakan cukup berhasil. Dengan pengetahuan yang baik siswa dikembangkan menjadi warga negara yang mampu dan terbiasa mengambil keputusan yang cerdas dan bernalar.

Seperti yang dikatakan Milner (2001 : 22) bahwa “... *the most likely method of improving levels of civic literacy is civics education*. Pendidikan Kewarga negaraan disini menjadi salah satu metode untuk meningkatkan kemelekwacaan warga. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan (dalam Sapriya dan Winataputa, 2004: 2-3) adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kemelekwacanaan

warga disini merupakan bagian dari kecerdasan warga negara dimana untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional dan intelektual semata melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial. Sehingga apabila seseorang dikatakan telah melek wacana maka ia akan memiliki keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual ini penting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab, antara lain adalah keterampilan berfikir kritis yang meliputi keterampilan mengidentifikasi dan mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan persoalan-persoalan publik (Sapriya dan Winataputa, 2004: 33).

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam peningkatan *civic literacy* siswa terlihat dalam proses pembelajaran PKn yang menggunakan diskusi sebagai metode, materi yang dibahas adalah isu-isu kontroversial yang sedang terjadi saat ini. Terjadi

perdebatan yang hangat antara guru dan siswa begitu pula siswa dengan siswa yang lainnya. Perilaku demokratis pun terlihat ketika siswa terlihat berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat teman-temannya dan mendengarkan pendapat dari teman yang lainnya. Dalam penugasan guru PKN sering memberikan tugas yang memanfaatkan media massa (koran), televisi dan internet sebagai medianya. Tugas-tugas seperti menonton berita, analisis artikel di koran dan internet. Sehingga siswa dapat ikut berpartisipasi mempertimbangkan kebijakan apa yang layak diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi saat ini. Hal ini seperti yang diungkapkan Milner (2001 : 7-8) ... *possible ways of enhancing civic literacy in Canada under three headings: education, media use and political institutions*". Media massa merupakan agen sosialisasi politik. Media massa baik itu media cetak seperti surat kabar, radio, televisi dan internet, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak dan sikap politik seseorang. Pengaruh

media massa cenderung bersifat massif, berskala besar dan segera. Sehingga dalam hal ini, media massa penting bagi peningkatan kualitas *civic literacy* siswa. Semakin banyak siswa menonton, membaca atau mendengar berita-berita politik maka semakin terbentuk paradigma politik dalam dirinya. Dengan pengetahuan yang memadai akan timbul kemauan untuk berbuat sesuatu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Sedangkan partai politik dapat meningkatkan kemelekwacanaan warga sesuai fungsinya sebagai agen komunikasi politik, partai politik bertugas mendengar keinginan rakyat dan menyalurkannya kepada wakil mereka yang duduk di lembaga perwakilan, sehingga masalah-masalah publik yang sedang terjadi di masyarakat dapat ditangani sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Dengan komunikasi yang baik antara partai politik dan warga negara, kemakmuran rakyat menjadi sebuah keniscayaan.

Guru PKN juga sering bekerjasama dengan instansi-instansi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Seperti pada materi

budaya politik, sekolah bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk melakukan sosialisasi dengan pemilih pemula guna peningkatang pengetahuan mereka mengenai pemilihan umum. Untuk meningkatkan pengetahuan materi hukum pihak sekolah sering mengundang perwakilan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk memberikan penjelasan pada siswa. Terkadang siswa juga diajak datang ke pengadilan untuk melihat proses persidangan. Hal ini penting bagi peningkatan kualitas pengetahuan siswa, sehingga dengan pengetahuan dan informasi yang memadai diharapkan siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupannya.

Penguatan *civic literacy* juga terlihat di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, OSIS sebagai organisasi sekolah memberikan sosialisasi pentingnya partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS dijadikan sebagai simulasi atas Pemilihan Umum yang akan sebenarnya sehingga siswa mendapatkan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Pemilu di usia dini. Kemudian ekstrakurikuler *debating club* dan *siswa sadar*

hukum di sekolah berfungsi sebagai pembiasaan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan partisipatif.

Segala upaya yang dilakukan oleh guru dalam rangka peningkatan kemelekwacaan warga bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup warga itu sendiri. Karena kemelekwacanaan warga akan mempengaruhi kualitas partisipasi politiknya. Partisipasi warga negara dilandasi dengan pengetahuan yang memadai (*fostering informed political participation*) akan menambah efikasinya (Suryadi, 2008 :152). Sehingga warga negara hendaknya mengerti bahwa keterlibatan dirinya dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat demokratis dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di lingkungannya. Kemelekwacanaan warga ada kaitannya dengan kesadaran politik (*political awareness*), ialah kemampuan siswa menjadi paham (*informed about*) dan peka (*sensitive*) terhadap aspek-aspek politik, sosial dan ekonomi di masyarakatnya. Oleh karena itu seseorang tidak cukup memiliki keterampilan saja, namun harus

memiliki wawasan (*literacy*) sebagai dasar untuk dapat berpartisipasi politik. Inilah yang menjadi landasan mengapa PKN bertujuan mempersiapkan siswa untuk dapat berperan aktif dalam kehidupannya.

Faktor yang menghambat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan kemelek wacanaan warga adalah terlalu luasnya bahan/isi pelajaran. Pabila kita bertitik tolak dari civic yang merupakan cabang ilmu politik, maka unsur utama yang menjadi fokus pelajaran civic adalah demokrasi politik. Gross and Zeleny (dalam Somantri, 2001:285) menyatakan bahwa isi dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah (a) teori-teori tentang demokrasi politik, (b) konstitusi negara, (c) sistem politik, (d) partai politik, (e) pemilihan umum, (f) lembaga-lembaga pengambil keputusan, (g) Presiden, lembaga yudikatif dan legislatif, (h) *output* dari sistem demokrasi politik, (i) kemakmuran umum dan pertahanan negara dan (j) perubahan sosial. Untuk program di sekolah, bahan-bahan tersebut masih harus disesuaikan atau direorganisasikan dengan tingkat

kebutuhan siswa atau sering disebut dengan “*basic human activities*”, dengan demikian para pendidik dapat menyusun kerangka acuan PKN yang terdiri atas (a) *formal content*, (b) *informal content*, (c) respons siswa terhadap *formal* dan *informal content*, dan (d) sintesis dari kebutuhan pribadi, masyarakat dan kebutuhan negara.

Dalam menyampaikan bahan-bahan yang cukup banyak tersebut masalah yang sering muncul adalah guru menggunakan teknik mengajar “tradisional” seperti *ground covering technique*, *drill master*, *indoktrinasi* dan *narrative technique*. Teknik ini bukan tidak bermanfaat, melainkan bila dilihat dari teori psikologi medan (*field psychology*) kurang dapat memobilisasi dan menumbuhkan potensi berfikir, sikap dan keterampilan siswa. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru harus dapat merubah kebiasaan yang sudah “melembaga” tersebut. Dalam paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan teknik mengajar diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis siswa dengan cara (a) guru harus menjadikan kelas civics sebagai

laboratorium demokrasi, (b) persiapan-persiapan mengajar menuntut pikiran dan waktu lebih banyak, (c) sumber dari buku pelajaran harus dikomunikasikan dengan masyarakat, yang mungkin mengundang kontroversi, (d) berbagai jenis teknik mengajar harus bergantian menjadi alat bagi guru misalnya diskusi, panel, dan sosiodrama.

Namun, dalam menyusun desain pembelajaran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain (a) kekuatan dan kelemahan pada diri guru. Dalam penggunaan metode mengajar, misalnya ada guru yang mahir menggunakan metode diskusi namun kurang mahir dalam berceramah. Kemahiran dan kekurangan ini hendaknya disadari pada saat mendesain pembelajaran. (b) ketertarikan guru. Kekuatan kecakapan guru akan bervariasi sesuai dengan hobi dan ketertarikannya pada suatu objek. (c) Harapan guru. Guru memiliki harapan yang berbeda dari siswa yang berbeda. Harapan guru terhadap siswa yang pandai akan lebih besar daripada harapannya terhadap siswa yang kurang pandai. (d) Sikap guru

terhadap pengembangan dan inovasi kurikulum. (e) Gaya kepemimpinan guru dapat mempengaruhi produktivitas anak-anak di ruangan kelas. Gaya kepemimpinan demokratik diajarkan sebagai bentuk gaya yang perlu dikembangkan di sekolah. Walaupun produktivitas anak paling tinggi di bawah gaya kepemimpinan otokratik apabila ia hadir di ruangan kelas. Anak-anak merasa puas dan senantiasa produktif di bawah pengasuhan guru yang demokratis. (f) Evaluasi diri guru. Banyak guru profesional yang selalu mengevaluasi kemampuannya baik oleh diri sendiri maupun orang lain, misalnya siswa. (g) Peran guru dalam kegiatan kurikulum seperti MGMP, idealnya guru akan mendapat banyak pengalaman sebagai bahan untuk analisis situasi dari faktor internal (Damsar, 2010 : 162, Somatri, 2001 : 289, Sapriya dan Winataputra, 2004 : 45-46). Dari pembahasan di atas, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan kemelewanan warga. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dan menyusun desain pembelajaran merupakan keterampilan

ilan yang harus dimiliki oleh pendidik profesional. Peningkatan profesionalitas juga harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga dengan pembelajaran khususnya Pendidikan Kewarganegaraan yang baik, diharapkan siswa memiliki pengetahuan yang memadai untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakatnya secara cerdas dan bertanggung jawab

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan peneliti serta hasil pembahasan yang didapat secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berpengaruh dalam mengembangkan kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatorinya, sehingga dapat membuat partisipasi politik siswa menjadi lebih aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori siswa maka partisipasi politik siswa pun akan lebih aktif. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari

ketertarikan siswa dalam mendiskusikan masalah-masalah politik dan kemampuan siswa untuk ikut berperan serta dalam memutuskan masalah.

Secara khusus kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kemelekwacanaan warga menjadi elemen penting dalam menentukan kualitas partisipasi warga negara. Hal ini disebabkan proses partisipasi yang disertai dengan daya nalar yang kuat dan melalui pemikiran yang kritis akan mempengaruhi kemajuran partisipasi politik tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan politik siswa. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan faktual dan kecakapan kognitif. Dengan demikian, siswa memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam lingkungannya. Partisipasi yang dilandasi dengan pengetahuan yang baik diyakini akan menambah kemajurannya.

Siswa yang memiliki keterampilan partisipatori yang baik maka ia akan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politiknya.

Pembelajaran Pendidikan Kewarga negara bukan hanya sekedar memberikan penguasaan pengetahuan saja, namun dibelajarkan mengenai keterampilan-keterampilan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Keterampilan seperti berinteraksi, memonitoring, dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik merupakan wujud pengembangan dari partisipasi politik yang positif, sehingga dengan demikian warga negara memiliki kemampuan untuk turut memikirkan apa yang dipertimbangkan pemerintah bagi perwujudan kepentingan bersama.

Seorang siswa memiliki pengetahuan yang memadai, maka ia juga akan cenderung memiliki keterampilan yang baik pula. Hal ini terlihat apabila siswa memiliki tingkat berfikir yang kritis, maka siswa tersebut akan berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan diskusi mengenai masalah-masalah politik di kelas. Sehingga siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalahnya sehingga ketika terjun ke masyarakat ia sudah siap menjadi seorang decision maker.

Pengembangan kemelekwanan warga dan keterampilan partisipatori dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam meningkatkan partisipasi politik siswa. Untuk menghasilkan partisipasi yang positif bukan hanya diperlukan pengetahuan saja, tetapi dibutuhkan keterampilan yang memadai guna adanya perubahan terhadap situasi yang ada. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan bukan hanya sekedar menumbuhkan partisipasi dari warga negara namun benar-benar sebagai partisipasi yang cerdas dan penuh tanggung jawab, serta terampil dalam melakukan tindakan yang terarah dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A., Verba, Sidney.(1984). *Budaya Politik* (Judul Asli : *The Civic Culture*), Diterjemahkan Oleh Sahat Simamora. Jakarta : Bina Aksara
- Al Muchtar, S. (2001) *Pendidikan dan Masalah Sosial Budaya*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Aryani & Susatim. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis*

Nilai. Bogor : Ghalia Indonesia

Brownhill, Robert and Patricia Smart (1989). *Political Education*. London and New York: Routledge

Budiardjo Miriam (1982) *Partisipasi dan Partai Politik Jakarta* : Gramedia

Budimansyah, Dasim dan Syam, Syaifullah (Ed). (2006). *Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan: Bandung

Huntington. P. Samuel dan Nelson, Joan. M. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kartono, kartini. (1989). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Pendidikan Orang Maju*. Bandung: Mandar Maju

Milner, Henry (2002) *Civic Literacy (How Informed Citizens Make Democracy Work*. University Press of New England. United States of America.

Winataputra. U. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan demokrasi*. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak Diterbitkan